ABSTRAK

M. FADZILLAH IQBAL, 126103202144, Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Pembimbing: Muksin, S.H., M.H

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kegiatan di bidang sektor pertambangan yang kini menjadi salah satu kegiatan yang menunjang suatu pembangunan di Indonesia, namun dengan adanya kegiatan pertambangan tentunya dapat menimbukan adanya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya pertambangan yang terdapat di Kabupaten Trenggalek yang mana terdapat banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat sekitar dikarenakan area pertambangan sangat dekat dengan area permukiman dengan hal tersebut sejak tahun 2005 terdapat banyak konflik pertambangan yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dalam proses penambangan maka sangat diperlukan kontrol terhadap kegiatan pertambangan sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara. Dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014 Terhadap Pengawasan Usaha Pertambangan Rakyat Batuan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Dari latar belakang tersebut maka dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana Implementasi Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014. 2). Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Batuan yang melanggar aturan Di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. 3). Bagaimana Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk Mengetahui Implementasi Pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Sesuai Peraturan Bupati Trenggalek No. 40 Tahun 2014. 2). Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan Pertambangan Rakyat Batuan yang melanggar peraturan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. 3). Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pertambangan Rakyat Batuan di Kecamatan Tugu Perspektif Fiqh Siyasah

Metode peneltian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan *(field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan Teknik Pengolahan Data menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan, Analisa data menggunakan kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh inspektur tambang, pengawasan berdasarkan Perbup Trenggalek Nomor 14 Tahun 2014 tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena kontradiksi dengan pasal 141 UU Nomor 3 Tahun 2020, pengawasan yang dilakukan oleh inspektur pertambangan, antara lain yang pertama pengawasan teknis pertambangan, yang kedua Pengawasan konservasi sumber daya Mineral dan Batubara, yang ketiga Pengawasan keselamatan pertambangan, yang keempat Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang, yang keempat Pengawasan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. Kehadiran inspektur tambang dalam kegiatan inspeksi maupun evaluasi di pertambangan Kecamatan Tugu dilakukan dalam setahun setidaknya lebih dari 2 kali. 2) Penerapan Sanksi Atas Pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat di Kecamatan Tugu yang melanggar aturan Perbup Trenggalek Nomor 40 Tahun 2014 tidak berjalan secara optimal, karena tidak adanya kepastian hukum di dalam Perpub tersebut mengenai siapa yang berhak memberikan sanksi kepada pengelola tambang jika merusak lingkungan sekitar sehingga menimbulkan adanya saling lempar tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Polri di Kabupaten Trenggalek, namun kewenangan memberi sanksi atas perusakan lingkungan oleh pihak pertambangan diatur dalam pasal 151 UU Nomor 4 tahun 2009 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK. Kemudian kendala penerapan sanksi kepada pihak pengelola tambang ini antara lain dari banyaknya kepala pengelola pertambangan di satu perusahaan pertambangan di Kecamatan Tugu serta banyaknya truk yang berasal dari luar pertambangan mengangkut hasil pertambangan dari perusahaan pertambangan di Kecamatan Tugu yang menghambat penerapan sanksi. 3) Dalam tinjauan fiqih siyasah, pengawasan dari kegiatan pertambangan harus dilakukan oleh negara, adapun untuk hasil pertambangan merupakan barang milik masyarakat, dengan demikian tiada seorang pun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu, pertambangan ini temasuk ke dalam maslahah yang bersifat sosial-objektif (al-maslahah al-‘ammah). Kepengelolaan pertambangan tidak boleh dilakukan oleh perorangan menurut tinjauan fiqih siyasah, karena milik masyarakat negara, maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum tindakan tersebut penerapan dari dalil Q.S Al-A’raf ayat 56.

ABSTRACT

M. FADZILLAH IQBAL, 126103202144, Implementation Of Regent Regulation No. 40 year 2014 to supervise the mining business of Batuan people in Tugu District, Trenggalek Regency, Constitutional Law Study Program, Department of Sharia, Faculty of Sharia and Legal Sciences, State Islamic University Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, supervisor: Muksin, S.H., M.H

Keywords: Implementation, Regent Regulation No. 40 Of 2014 On The Supervision Of The Mining Business Of The People Of Batuan

This research is motivated by the existence of an activity in the field of mining sector which is now one of the activities that support a development in Indonesia, but with the existence of mining activities can certainly cause the risk of pollution and environmental damage. One of them is mining in Trenggalek Regency where there are many negative impacts felt by the surrounding community because the mining area is very close to the residential area with it since 2005 there have been many mining conflicts involving the community and the company. As an effort to maintain environmental sustainability in the mining process, it is very necessary to control mining activities in accordance with Regent Regulation No. 40 of 2014 on licensing and supervision of Mineral and Coal people's mining. In this case, the author wants to examine more deeply how the implementation of Regent Regulation No. 40 Of 2014 On The Supervision Of The Mining Business Of The People Of Batuan In Tugu District, Trenggalek Regency

The focus of research in this study include: 1) How the implementation of mining supervision of Batuan people in Tugu District, Trenggalek Regency in accordance with Regent Regulation No. 40 of 2014 2) How the application of sanctions on the implementation of mining in the District of rock folk Monument Trenggalek Regency 3) How the supervision of mining in the District of rock folk Monument Siyasah Fiqh perspective, as the objectives of this study are: 1) to determine the implementation of the supervision of mining in the District of rock folk Monument Trenggalek Regency Regent Regulation No. 40 of 2014 2) to find out how the implementation of sanctions on the implementation of the people's mining in the District of Rock Monument Trenggalek Regency 3) to find out how the supervision of the people's mining in the District of Rock Monument perspective Fiqh Siyasah

Research methods used by researchers are qualitative methods and types of Field Research (field research). Data collection techniques used in this study in the form of observation, interviews, documentation. While Data processing techniques using documentation studies and literature studies, data analysis using data condensation, data presentation, conclusion

The results of this study indicate that: 1) The implementation of Mining Supervision in Tugu District, Trenggalek Regency is carried out by mining inspectors, supervision based on Trenggalek Regent Regulation Number 14 of 2014 cannot be fully implemented because it contradicts Article 141 of Law Number 3 of 2020, supervision carried out by mining inspectors, including the first is technical mining supervision, the second is Supervision of Mineral and Coal resource conservation, the third is Mining safety supervision, the fourth is Supervision of environmental management, Reclamation, and Post-mining, the fourth is Supervision of mastery, development, and application of Mining technology. The presence of mining inspectors in inspection and evaluation activities in Tugu District mining is carried out at least more than 2 times a year. 2) The Implementation of Sanctions for the Implementation of Community Mining Activities in Tugu District that violate the Trenggalek Regent Regulation Number 40 of 2014 has not run optimally, because there is no legal certainty regarding who has the right to impose sanctions on mining managers if they cause damage, resulting in mutual shifting of responsibility from the Environmental Service, Transportation Service and Police in Trenggalek Regency. Then there are many mining managers in one mining company in Tugu District and many trucks from outside the mining area transporting mining results from mining companies in Tugu District. 3) In terms of fiqh siyasah, supervision of mining activities must be carried out by the state, while mining results are property of the community, thus no one has the right to control it or even own it individually, this mining is included in the social-objective maslahah (al-maslahah al-'ammah). Mining management may not be carried out by individuals according to the perspective of legal jurisprudence, because it belongs to the people of the country, so it must be managed in general, which is represented by the state or authorized government so that the benefits of the goods can be felt by the public. This action is an application of the evidence in Q.S. AL-A'raf verse 56.

الملخص

فضيلة إقبال ، ١٢٦١٣٠٢٠٢١٤٤ ، تنفيذ لائحة الوصاية رقم ٤٠ عام ٢٠١٤ للإشراف على أعمال التعدين لأهالي باتوان في منطقة توجو ، ترينغاليك ريجنسي ، برنامج دراسة القانون الدستوري ، قسم الشريعة ، كلية الشريعة والعلوم القانونية ، جامعة الدولة الإسلامية السيد علي رحمة الله تولونجاجونج ،

المشرف: موكسين ، سمو الكلمات الرئيسية: التنفيذ ، لائحة ريجنت رقم ٤٠ لعام ٢٠١٤ بشأن الإشراف على أعمال التعدين لشعب باتوان

هذا البحث مدفوع بوجود نشاط في مجال قطاع التعدين وهو الآن أحد الأنشطة التي تدعم التنمية في إندونيسيا ، ولكن مع وجود أنشطة التعدين يمكن أن يسبب بالتأكيد خطر التلوث والأضرار البيئية. واحد منهم هو التعدين في ترينغاليك ريجنسي حيث هناك العديد من الآثار السلبية التي يشعر بها المجتمع المحيط لأن منطقة التعدين قريبة جدا من المنطقة السكنية معها منذ عام ٢٠٠٥ كانت هناك العديد من الصراعات التعدين التي تنطوي على المجتمع والشركة. في محاولة للحفاظ على الاستدامة البيئية في عملية التعدين ، من الضروري للغاية التحكم في أنشطة التعدين وفقا للائحة ريجنت رقم ٤٠ لعام ٢٠١٤ بشأن الترخيص والإشراف على تعدين المعادن والفحم. في هذه الحالة ، يريد المؤلف أن يدرس بشكل أعمق كيفية تنفيذ لائحة ريجنت رقم ٤٠ لعام ٢٠١٤ بشأن الإشراف على أعمال التعدين لشعب باتوان في منطقة توجو ، ترينغاليك ريجنسي

محور البحث في هذه الدراسة ما يلي: ١) كيفية تنفيذ الإشراف على التعدين من شعب باتوان في منطقة توجو ، ترينغاليك ريجنسي وفقا للائحة ريجنت رقم ٤٠ لعام ٢٠١٤ ٢) كيفية تطبيق العقوبات على تنفيذ التعدين في منطقة نصب الصخور الشعبية ترينغاليك ريجنسي ٣) كيفية الإشراف على التعدين في منطقة نصب الصخور الشعبية سياسة الفقه المنظور ، حيث أن أهداف هذه الدراسة هي: ١) تحديد تنفيذ الإشراف على التعدين في منطقة نصب الصخور الشعبية ترينغاليك ريجنسي ريجنت اللائحة رقم. ٤٠ لسنة ٢٠١٤ ٢) لمعرفة كيفية تنفيذ العقوبات على تنفيذ التعدين الشعبية في منطقة الصخرة نصب ترينغاليك ريجنسي ٣) لمعرفة كيفية الإشراف على التعدين الشعبية في منطقة الصخرة نصب منظور الفقه سياسة.

تظهر نتائج هذا البحث ما يلي: ١) يتم تنفيذ الإشراف على التعدين في منطقة توغو، مقاطعة ترينجاليك من قبل مفتشي التعدين، ولا يمكن تنفيذ الإشراف على أساس لائحة ترينجاليك رقم ٢٠١٤ لعام ٢٠١٤ بالكامل لأنه ٣ لسنة ٢٠٢٠، يتم الإشراف من قبل مفتشي يتعارض مع المادة ١٤١ من القانون رقم وفقًا لأحكام القانون رقم التعدين، من بين آخرين، الأول هو الإشراف الفني على التعدين، والثاني هو الإشراف على الحفاظ على الموارد المعدنية والفحم، والثالث هو الإشراف على سلامة التعدين، والرابع هو الإشراف على الإدارة البيئية، الاستصلاح

وما بعد التعدين، والرابع هو الإشراف على إتقان وتطوير وتطبيق تكنولوجيا التعدين. يتم حضور مفتشي التعدين في أنشطة التفتيش والتقييم في مجال التعدين في منطقة توغو مرتين في السنة على الأقل. ٢) لا يتم تنفيذ العقوبات المفروضة على تنفيذ أنشطة التعدين المجتمعية في منطقة توغو والتي تنتهك لائحة ترينجاليك ريجنسي رقم لعام ٢٠١٤ على النحو الأمثل، لأنه لا يوجد يقين قانوني بشأن من له الحق في فرض عقوبات على مديري المناجم إذا كانوا كذلك تضررت، مما أدى إلى نقل المسؤولية عن بعضها البعض خدمة البيئة وخدمة النقل والشرطة الوطنية في مقاطعة ترينجاليك. ثم هناك العديد من رؤساء مديري التعدين في شركة تعدين واحدة في منطقة توغو والعديد من الشاحنات القادمة من خارج المنجم تنقل منتجات التعدين من شركات التعدين في منطقة توغو. ٣) من وجهة نظر فقه السياسة فإن الإشراف على أنشطة التعدين يجب أن يكون من قبل الدولة، أما المنتجات التعدينية فهي بضائع مملوكة للمجتمع، فلا يحق لأحد السيطرة عليها أو حتى تملكها بشكل فردي، هذا التعدين تدخل في المشكلة الاجتماعية الموضوعية (المصلحة العامة). لا يجوز أن تتم إدارة التعدين من قبل الأفراد وفقا لمراجعة فقه السياسة، لأنه ينتمي إلى مجتمع الدولة، بل يجب أن يدار بشكل عام، ممثلة من قبل الدولة أو الحكومة المختصة حتى يشعر بفوائد البضائع. العامة وهذا الإجراء ينطبق على اقتراح سورة الأعراف الآية٦٥.